

## DAFTAR PUSTAKA

- Ateng Syafrudin, Pengaturan Koordinasi Pemerintah Daerah, PT. Citra Adyitya, Bandung, 1993.
- A. Siti Soetami, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Semarang, 1993.
- Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 45, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Charles.O. Jones, Pengantar Kebijakan Public, Rajawali Press, Jakarta, 1997.
- Inu Kencana Syahfie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Eresco, Jakarta, 1997.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 1988.
- Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, PT. Gramedia, Jakarta, 1983.
- Mashuri Maschab, Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut UUD 1945, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Misdayani dan R.G.Kartasaputra, Fungsi Pemerintah Daerah dan Pembuatan Peraturan Daerah, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Oberlin Silalahi, Beberapa Aspek Kebijaksanaan Negara, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Soegiri, SH., Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa Menurut Hukum Perdata, Biro Hukum Setwilda Tingkat I Jawa Tengah
- Sri Soemantri, Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945, Alumni, Bandung, 1974.

Serjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1988.

\_\_\_\_\_, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1981.

S.F Marbun dan Moh. Mahfud, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Liberty, Yogyakarta, 1987.

Tjahya Supriatna, Sistem Administrasi Pemerintah di Daerah, Bumi Aksara, 1983.

Victor Situmorang, Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara, Bina Aksara, Jakarta, 1989.

Victor Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Hukum Administrasi di Daerah, Sinar Grafika, 1993.

Undang-undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1993.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( UU No.8 Tahun 1981 ), Aneka Ilmu, Semarang, 1984.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Surat Keputusan Walikotmadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor:188.3.05/0200/1997 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Kumpulan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang